

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tesis ini membahas tentang politik pembangunan berbasis pemberdayaan di Desa Wisata Ketapanrame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan lebih kepada desa untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan secara mandiri, sebab desa diberikan asas otonomi untuk dapat mengatur dan mengurus wilayahnya termasuk pembangunan desa (Amane et al., 2023, pp. 5–7; Nasution et al., 2023). Pembangunan desa didefinisikan sebagai proses yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat desa dengan tujuan meningkatkan taraf hidup serta memperbesar kesejahteraan dalam desa (Nain, 2018, p. 18), karena pembangunan desa juga dikenal sebagai kreasi dan simbol dari pergeseran idiom “membangun desa” menjadi “desa membangun” (Amane et al., 2023, pp. 1–7; Tamianingsih & Eprilianto, 2022).

Pembangunan di desa menarik untuk diteliti sebab desa masih menghadapi berbagai tantangan seperti kemiskinan, minimnya peluang ekonomi dan kurangnya akses terhadap layanan publik (Fahcrurokhim et al., 2024; Muzaqi et al., 2022; Popoola, 2022). Umumnya penelitian terkait pembangunan desa mengkaji upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat, menumbuhkan kemandirian, pengembangan potensi lokal, pemberdayaan dan keberlanjutan (Rizwan & Jaman, 2023; Sena et al., 2023), sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pembangunan di desa pada aspek yang lebih politis menggunakan kerangka teori politik pembangunan berbasis pemberdayaan.

Politik pembangunan merupakan kajian terhadap strategi atau cara politik yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan (Warjio, 2016, p. 140), sedangkan pemberdayaan merupakan upaya untuk mengakui dan memanfaatkan sumber daya manusia melalui berbagai program dengan melibatkan masyarakat untuk menguatkan kelembagaan lokal (Suryawan & Mahagangga, 2024, p. 2). Beberapa penelitian terdahulu menggunakan politik pembangunan sebagai landasan untuk melakukan analisis terhadap aktor yang berperan atau terlibat dalam proyek pembangunan serta mendefinisikan beberapa variabel dalam politik pembangunan yang meliputi aktor, kekuasaan, sistem, ideologi dan intervensi asing (Gultom, 2022; Sahidin et al., 2024; Yunindyawati et al., 2022). Penelitian ini menggunakan politik pembangunan sebagai landasan analisis terhadap strategi politik yang digunakan dalam pembangunan sehingga tidak hanya mendeskripsikan variabel yang terdapat dalam politik pembangunan, namun penelitian ini juga mengkaji strategi atau cara politik yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan.

Alasan utama politik pembangunan menarik untuk dikaji adalah untuk melakukan analisis terhadap jenis pendekatan yang dilakukan oleh aktor pembangunan dalam mencapai tujuan pembangunan, apakah menggunakan pendekatan sentralistik (*top down*) yang lebih didominasi oleh pemerintah pusat atau menggunakan pendekatan desentralistik (*bottom up*) yang lebih mengutamakan kewenangan desa dalam merencanakan pembangunan. Penelitian dengan topik politik pembangunan pada objek kajian pembangunan daerah menjelaskan bahwa pembangunan daerah menggunakan jenis pendekatan sentralistik atau *top down* sehingga rencana pembangunan lebih didominasi oleh pemerintah sedangkan masyarakat dilibatkan sebagai

stakeholder yang berpartisipasi pada proses pembahasan pelaksanaan pembangunan (Azis et al., 2022; Dharmaanggara et al., 2021; Sembiring, 2022), sedangkan penelitian terkait politik pembangunan di desa wisata belum banyak dilakukan meskipun umumnya pembangunan di desa dipahami sebagai pembangunan desentralistik sebab pemerintah desa memiliki wewenang terhadap pembangunan di daerahnya namun kajian terhadap politik pembangunan di desa belum banyak dilakukan.

Pembangunan desa wisata merupakan hasil dari proses politik yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama komunitas masyarakat, umumnya pembangunan desa wisata dilakukan oleh kepala desa sebagai insiator pembangunan (Hanggraito et al., 2023; Ismail et al., 2024) yang selanjutnya dikembangkan melalui kegiatan musyawarah pembangunan desa (musrembangdes) dengan tujuan untuk melakukan analisis terhadap potensi desa yang dapat dikembangkan sebagai objek pariwisata, seperti agrowisata yang memanfaatkan lahan pertanian, eduwisata yang memanfaatkan situs sejarah dan wisata budaya yang memanfaatkan budaya atau sejarah lokal (Hanggraito et al., 2023; Ismail et al., 2024; Vandayani & Widiyarta, 2022). Penelitian ini mengkaji jenis pembangunan desa wisata sebagai pembangunan berbasis pemberdayaan, hal ini didasarkan konsep pemberdayaan yang lebih tepat digunakan pada pembangunan desa karena pemberdayaan dipahami sebagai upaya untuk mengakui dan memanfaatkan sumber daya manusia menggunakan pendekatan holistik melalui program, pelatihan, pengambilan keputusan dengan melibatkan masyarakat dan penguatan kelembagaan lokal (Suryawan & Mahagangga, 2024, p. 2).

Penelitian terkait pemberdayaan di desa wisata menjelaskan bahwa kelompok masyarakat diberdayakan melalui program kemitraan dibawah naungan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam bentuk mitra usaha atau mitra kerja (Fernanda & Sukmana, 2024; Tamianingsih & Eprilianto, 2022) atau sebagai pelaku ekonomi dan pengusaha lokal di wilayah objek wisata (Apostolopoulos et al., 2020; Qianwen, 2023; Regmi et al., 2023). Berdasarkan penelitian sebelumnya dapat diketahui bahwa kajian pemberdayaan pada objek pariwisata umumnya dikaji sebagai pemberdayaan ekonomi setelah pembangunan dilakukan, sedangkan penelitian ini mengkaji pemberdayaan sebagai manfaat dari adanya pariwisata terhadap para aktor pembangunan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui keberlanjutan dari pembangunan desa wisata sebab aktor-aktor yang terlibat pada pembangunan desa wisata merupakan individu atau kelompok yang diberdayakan atas partisipasi mereka pada proses pembangunan sehingga secara tidak langsung aktor-aktor ini memiliki tanggung jawab, peran dan fungsi terhadap pariwisata di desa. Kajian terhadap pemberdayaan aktor pada pembangunan desa wisata menggunakan kerangka kerja penentuan pemberdayaan pada pengembangan pariwisata yang terdiri atas pemberdayaan ekonomi, sosial, politik dan psikologi (Rachmawati, 2021, pp. 24–34).

Politik pembangunan berbasis pemberdayaan di desa wisata merupakan kajian terhadap adanya keterkaitan strategi politik pada pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan dengan manfaat yang diperoleh aktor terhadap perannya pada pembangunan desa wisata. Hal ini berarti pembangunan yang dikaji merupakan upaya politik yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari pembangunan desa wisata, sehingga kajian politik pembangunan berbasis

pemberdayaan di desa wisata juga berpotensi menyebabkan munculnya *elite* atau kelompok elit untuk melakukan dominasi terhadap proses dan hasil dari pembangunan desa wisata. Penelitian terkait kemunculan *elite* atau kelompok elit pada pembangunan desa wisata menyebutkan bahwa elit muncul dengan tujuan melakukan dominasi terhadap kepentingan kelompok elit adat yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sehingga mendorong wacana untuk pengembangan pariwisata agar kegiatan ekonomi dapat berlangsung (Aprigiyana et al., 2021). Penelitian lain menyebutkan bahwa elit lokal memiliki peran yang strategis dalam pengembangan pariwisata, hal ini didasarkan pada peran politik elit lokal yang dikategorikan sebagai pemimpin opini yang dapat menghasilkan dan menyebarkan gagasan, mediator yang menjembatani aspirasi dan kepentingan di antara pemangku kepentingan dan mengambil keputusan yang memformulasikan dan mengimplimentasikan kebijakan (Fitriyah et al., 2024). Berdasarkan penelitian sebelumnya dipahami bahwa pembangunan desa wisata juga dapat memicu munculnya kelompok elit dengan tujuan melakukan dominasi terhadap proses pembangunan, sehingga penelitian ini juga akan melakukan kajian terhadap kemunculan elit dalam pembangunan sebagai sebab akibat dari adanya proyek pembangunan desa wisata.

Desa yang menjadi objek penelitian adalah Desa Ketapanrame yang terletak di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto Jawa Timur, secara geografis desa ini berpotensi untuk dibangun sebagai desa wisata sebab terletak di antara wilayah dataran tinggi, tepatnya di antara dua pegunungan yaitu Gunung Penanggungan dan Gunung Welirang. Aspek lain yang mendukung desa ini menjadi desa wisata adalah adanya budaya yang masih terjaga dan terus dilaksanakan oleh masyarakat desa, seperti sedekah bumi, seni bantengan dan

budaya lokal lainnya (Mojokerto, 2024). Faktor yang mempengaruhi desa ini menarik untuk diteliti adalah Desa Ketapanrame seringkali dijadikan objek penelitian, sebab Desa Ketapanrame disorot sebagai salah satu desa yang mengalami banyak perkembangan sejak ditetapkan sebagai desa wisata pada tahun 2018 (Syafii, 2023) dan berhasil menjadi pemenang pada Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) dalam kategori desa wisata terbaik (Baparekraf RI, 2023). Penelitian terkait Desa Ketapanrame sebagai desa wisata, umumnya dilakukan pada aspek manajemen pengembangan pariwisata meliputi upaya yang dilakukan oleh BUMDes selaku unit usaha desa dalam mengelola objek pariwisata di Desa Ketapanrame (Muhaimin, 2019; J. C. Putri, 2024; Setiawan et al., 2024), sedangkan penelitian terhadap kajian politik masih belum banyak dilakukan sehingga penelitian ini berusaha melakukan kajian terhadap politik pembangunan berbasis pemberdayaan di desa wisata untuk mengisi kajian politik terhadap pembangunan Desa Wisata Ketapanrame.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian terhadap strategi atau cara politik yang digunakan pada pembangunan berbasis pemberdayaan di desa wisata, sehingga penelitian ini menggunakan judul “Politik Pembangunan Berbasis Pemberdayaan di Desa Wisata Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto Tahun 2024” sebagai judul penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana bentuk politik pembangunan berbasis pemberdayaan di Desa Wisata Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto?

- b. Apa dampak dari kemunculan elit pada pembangunan Desa Wisata Ketapanrame?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Melakukan analisis terhadap strategi politik yang digunakan pada pembangunan desa wisata serta manfaat pemberdayaan yang didapatkan aktor pada keterlibatannya pada pembangunan Desa Wisata Ketapanrame.
- b. Melakukan analisis terhadap dampak kemunculan elit berdasarkan kajian *elite capture* pada proses pembangunan Desa Wisata Ketapanrame.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam aspek teoritis dan aspek praktis:

- a. Aspek teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan khususnya tentang politik pembangunan berbasis pemberdayaan di Desa Wisata Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto dengan kajian terkait aktor-aktor yang terlibat dalam pembangunan, peran aktor dalam proses pembangunan dan dampak kemunculan elit menggunakan kajian *elite capture* pada proses pembangunan Desa Wisata Ketapanrame.
- b. Aspek praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian tentang politik pembangunan berbasis pemberdayaan di Desa Wisata Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian terkait politik pembangunan berbasis pemberdayaan di desa wisata masih belum banyak dilakukan, sebab umumnya penelitian terkait desa wisata membahas tentang bentuk pemberdayaan masyarakat dan serangkaian

upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk memperkuat objek pariwisata seperti pada penetapan inovasi kebijakan dalam pengembangan pariwisata dan inovasi terhadap model pengelolaan pariwisata (Fernanda & Sukmana, 2024; Silwana & Dube, 2022) serta upaya pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui ketersediaan lapangan kerja baru melalui pembangunan objek pariwisata di desa (Apostolopoulos et al., 2020; Matthoriq et al., 2021; Qianwen, 2023; Regmi et al., 2023). Berdasarkan penelitian sebelumnya diketahui bahwa kajian terkait pembangunan desa wisata umumnya hanya mengkaji inovasi kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat. Sedangkan peneliti beranggapan bahwa pembangunan desa wisata juga tidak terlepas dari proses politik, sehingga kajian tentang politik dalam pembangunan di desa wisata menjadi hal yang menarik untuk diteliti sebab keterlibatan aktor dalam pembangunan merupakan kunci utama dalam mencapai tujuan pembangunan (Warjio, 2016, p. 54).

Pembangunan di desa adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat desa dalam memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat untuk mencapai kemajuan desa (Nain, 2018, p. 17). Seperti dalam penelitian terkait pola politik pembangunan desa yang menjelaskan bahwa adanya otonomi desa menjadi langkah pembangunan desa berdasarkan potensi wilayahnya serta melibatkan masyarakat desa dalam proses pembangunan dengan tujuan pengentasan kemiskinan melalui organisasi masyarakat yang ada di desa sebagai entitas untuk memantau partisipasi dan kinerja pemerintah desa agar dapat meningkatkan keberhasilan program pembangunan (Gultom, 2021, 2022; Jwa, 2024). Berdasarkan penelitian sebelumnya diketahui bahwa dalam

pembangunan desa yang berbasis pada pengembangan potensi lokal juga harus melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti stakeholder yang ada di desa sebagai aktor dalam pembangunan. Sehingga dalam penelitian ini juga akan dijelaskan tentang aktor-aktor yang terlibat dalam pembangunan desa wisata.

Penelitian tentang aktor dalam pembangunan menyatakan bahwa aktor pembangunan secara fungsional berperan sebagai pembenahan tata kelola organisasi (Arditri et al., 2022), perancang, pengawas dan pelaksana kebijakan pembangunan di tingkat daerah (Azis et al., 2022; Pambudi & Kurniasari, 2021) atau aktor dalam pembangunan juga dapat berperan sebagai representator politik masyarakat yang menjabat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Hakim & Sejati, 2024). Berdasarkan penelitian sebelumnya dapat diketahui bahwa aktor dalam pembangunan adalah individu atau kelompok yang terlibat dan dapat mempengaruhi pembangunan (Warjio, 2016, p. 116). Kajian penelitian ini adalah aktor yang berasal dari pemerintahan desa yang terlibat dalam pembangunan desa wisata.

Pemberdayaan di desa wisata merupakan kajian yang membahas manfaat yang diperoleh aktor pembangunan, meliputi pemberdayaan ekonomi, politik, sosial dan psikologi. Penelitian tentang manfaat dari hadirnya pariwisata di desa, umumnya dikaji sebagai bentuk pemberdayaan kepada masyarakat desa, sehingga bentuk pemberdayaan di desa wisata berupa pemberdayaan ekonomi melalui kegiatan pariwisata sebagai pelaku atau pengelola wisata, pengusaha lokal dan pedagang di lokasi wisata (Apostolopoulos et al., 2020; Budiarta et al., 2022; Matthoriq et al., 2021; Pakpahan et al., 2024; Regmi et al., 2023; Tamianingsih & Eprilianto, 2022). Penelitian ini memiliki fokus kajian pada pemberdayaan terhadap aktor yang terlibat pada pembangunan desa, sebab jenis

pemberdayaan yang dikaji merupakan hubungan timbal balik terhadap peran aktor pada pembangunan desa wisata dengan menggunakan kerangka kerja pemberdayaan dalam pengembangan pariwisata oleh Scheyvens yang terdiri atas pemberdayaan politik, ekonomi, psikologi dan sosial (Rachmawati, 2021, p. 34)

Kajian *elite capture* dalam pembangunan desa wisata merupakan situasi dimana kelompok elit melakukan dominasi terhadap proyek pembangunan berdasarkan kepentingan yang mereka miliki atau menguasai sumber daya hasil pembangunan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu (Zulfiqar & Moosvi, 2022). Beberapa penelitian tentang fenomena *elit capture* terhadap kasus pembangunan menyatakan bahwa kemunculan kelompok elit pada pembangunan dimulai dari perbedaan kepentingan yang dimiliki oleh publik atau masyarakat dengan pejabat, sehingga seringkali menyebabkan tindakan misalokasi dana pembangunan hingga tindak pidana korupsi dana pembangunan (Al-Ra'zie & Wahyudi, 2022; Sutarna & Subandi, 2023). Pada penelitian lainnya dijelaskan bahwa kelompok elit adalah elit politik yang menguasai sumber daya alam hasil dari pembangunan yang dilakukan (Ayubi & Raffiudin, 2023), sedangkan pada kasus kemunculan elit pada pembangunan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melanggengkan kekuasaan yang didukung oleh legitimasi budaya atau adat (Zaman et al., 2024). Berdasarkan penelitian sebelumnya dapat diketahui bahwa fenomena *elit capture* dapat menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi, sebab proses pembangunan tidak dilakukan berdasarkan kepentingan umum dan sumber daya hasil dari pembangunan hanya dinikmati oleh orang atau kelompok tertentu. *Elit capture* pada pembangunan desa wisata merupakan pengembangan kajian terhadap kemunculan elit pada

pembangunan daerah, perbedaan kajian terletak pada objek penelitian karena penelitian ini mengkaji desa sebagai objek penelitian serta model pembangunan desa wisata merupakan model baru dalam pembangunan desa. Hal ini sangat memungkinkan jika pembangunan desa wisata rentan menjadi arena penguasaan elit pada proses dan hasil pembangunan, sehingga pada kajian *elit capture* juga akan dilakukan analisis terhadap dampak dari kemunculan elit pada pembangunan desa wisata.

1.6 Kerangka Teori

1. Politik Pembangunan

Pembangunan di Indonesia merupakan kata kunci bagi segala hal. Secara umum kata ini diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dengan tujuan memajukan ekonomi (Warjio, 2016, p. 91). Budi winarno mendefinisikan pembangunan sebagai upaya untuk membuka tabir dibalik berbagai pilihan dan orientasi kebijakan pembangunan yang di ambil, sehingga analisis aktor menjadi relevan karena setiap nilai dan keyakinan tertentu berimplikasi pada bagaimana proyek pembangunan dilakukan (2016, p. 92). *United National Development Program* (UNDP) dalam laporan pembangunan manusia bertema “*Depening Democracy in a Fragmented World*” menyatakan bahwa pembangunan ditentukan oleh langkah-langkah politik, sehingga kemiskinan dapat dihilangkan jika politik itu pro pada penanggulangan kemiskinan.

Pembangunan akan berjalan dengan baik jika semua orang punya hak untuk menentukan arah politik. Hal ini juga selaras dengan definisi yang ajukan oleh Masoed tentang pembangunan sebagai poses politik yang menghadirkan banyak aktor dan satu sama lain saling mempengaruhi untuk

menguatkan posisi mereka dalam persaingan kepentingan (2016, p. 99). Sehingga kajian pembangunan juga membutuhkan kajian politik untuk memahami pembangunan dalam aspek yang lebih politik menggunakan istilah politik pembangunan, sebab dalam politik pembangunan terkandung ide, pemikiran atau gagasan baik dari individu atau lembaga yang ingin mendapatkan keuntungan dari pembangunan (2016, p. 111).

Kajian politik pembangunan juga harus menjelaskan tentang rumusan siapa, apa, bagaimana dan mendapat apa. Siapa, menyangkut setiap individu atau kelompok yang secara lahiriah adalah insan politik yang terlibat dalam pembangunan baik untuk mewujudkan eksistensinya atau keinginannya, sehingga mereka disebut dengan aktor politik pembangunan. Apa, mengenai isu atau topik yang berkaitan dengan politik pembangunan seperti isu birokrasi, pertahanan, lingkungan, pemikiran, sumber daya dan partai politik. Bagaimana, berkaitan dengan cara atau strategi yang digunakan dalam meraih tujuan pembangunan. Mendapat apa, merupakan hasil yang dicapai atau diraih dalam pelaksanaan politik pembangunan yang dilakukan oleh aktor pembangunan, hasil ini dapat berupa jabatan, ekonomi, konsesi atau kekuasaan (2016, p. 112). Politik pembangunan memiliki definisi suatu cara atau strategi politik yang dilakukan oleh individu, kelompok masyarakat atau negara untuk mencapai tujuan pembangunan, sehingga pada dasarnya pembangunan dapat dipahami sebagai hasil dari proses politik yang dilakukan oleh aktor dalamnya (2016, p. 140). Politik pembangunan juga memiliki beberapa variabel untuk mengetahui bagaimana politik pembangunan dijalankan karena keberadaan variabel dalam politik

pembangunan bersifat saling mempengaruhi dan dipengaruhi, yaitu: aktor pembangunan, kekuasaan, sistem, ideologi dan intervensi luar atau asing.

Aktor pembangunan menurut definisi dari Norman Long adalah mereka yang terdiri atas pembuat kebijakan, peneliti, para agen, pengintervensi atau bahkan mereka di tingkat lokal yang memiliki pengaruh, baik dari segi kekuasaan atau dalam satu wilayah tertentu (Warjio, 2016, p. 211). Aktor pembangunan bergerak dalam ruang dan batas-batas kekuasaannya untuk mempengaruhi berjalannya proses pembangunan, dalam hal ini terdapat tiga perspektif yang diajukan oleh Warjio untuk memahami aktor pembangunan yang terlibat dalam proses pembangunan, yaitu perspektif institusi politik, perspektif *civil society* dan *economy society*. Perspektif institusi politik sebagai subjek penting yang memiliki kedudukan strategis karena berperan untuk melakukan dominasi kekuasaan yang dimainkan dalam konteks negara sehingga pembangunan dapat dilakukan (2016, pp. 116–119).

Perspektif *civil society* sebagai kelompok masyarakat atau unit di luar institusi negara, hal ini mengingat pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan sehingga dapat melakukan stimulasi kepada masyarakat untuk berorganisasi, terlibat dan memiliki kesempatan untuk mempengaruhi proses pembangunan. Masyarakat sipil pada politik pembangunan adalah ruang atau wadah bagi partisipasi masyarakat yang mencakup organisasi non politik, mahasiswa, petani dan buruh atau lainnya yang bukan bagian dari sektor negara (2016, pp. 119–122). Perspektif *economy society* sebagai mereka yang berasal dari perusahaan, pasar atau kelompok bisnis sebagai kelompok ekonomi yang memiliki kemampuan dan modal dalam

mempengaruhi pembangunan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dalam praktiknya (2016, pp. 122–123).

Kekuasaan merupakan syarat penting dalam pembangunan karena dengan kekuasaan individu, kelompok atau negara dapat mengintervensi pembangunan, kekuasaan dapat berupa *hard power* atau *soft power* (2016, p. 141). Sistem adalah mekanisme yang dimiliki oleh aktor pembangunan dalam merealisasikan tujuan pembangunan, mekanisme ini terjadi secara struktural dan memiliki hubungan timbal balik. Ideologi adalah semangat atau cita-cita yang menjadi penggerak aktor pembangunan untuk meraih tujuan, ideologi juga dapat dipahami sebagai cara pandang aktor terhadap tujuan pembangunan. Intervensi asing adalah aktor pembangunan yang berasal dari luar atau pihak non lokal yang terlibat dalam proses pembangunan yang dimainkan oleh aktor pembangunan dari dalam atau lokal (2016, p. 142).

2. Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan untuk memberikan daya (*empowerment*) atau kekuatan (*strengthening*) kepada masyarakat, sehingga pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan sebagai usaha memandirikan, mengembangkan, menswadayakan dan memperkuat posisi tawar masyarakat (Arfiansyah et al., 2023, p. 5). Tujuan dari pemberdayaan ini membuat masyarakat merasakan kebebasan, kepemilikan dan kekuasaan yang dapat mengarah pada perubahan sosial yang konstruktif (Rachmawati, 2021, p. 15). Aghazamani dan Hunt mendefinisikan pemberdayaan dalam konteks pariwisata sebagai proses multidimensi yang bergantung pada konteks yang dinamis untuk memberikan kesempatan kepada individu atau kolektif untuk

meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya dalam meningkatkan kualitas hidup sebagai fungsi dari keterlibatan adanya pariwisata. Sehingga objek pemberdayaan pada pembangunan wisata adalah masyarakat lokal, sebab masyarakat lokal perlu diberdayakan agar dapat menentukan tujuan pembangunan wisata dan menentukan kegiatan yang tepat untuk dikembangkan agar masyarakat memiliki kendali atas adanya pariwisata di wilayah mereka (2021, p. 17).

Kajian pemberdayaan pada tesis ini menggunakan kerangka kerja penentuan pemberdayaan dalam pengembangan pariwisata yang digagas oleh Scheyvens untuk mengukur manfaat dari pariwisata terhadap masyarakat lokal, yang memuat beberapa kategori dalam pemberdayaan ekonomi, politik, sosial dan psikologis digunakan sebagai alat analisis dalam melakukan analisis bentuk pemberdayaan masyarakat di desa wisata serta memperkuat kajian tentang bentuk pemberdayaan politik pada masyarakat desa pasca adanya pembangunan desa wisata. Pemberdayaan ekonomi mengacu pada akses terhadap peluang dan manfaat ekonomi yang muncul dari pembangunan pariwisata, hal ini dapat berupa adanya kesempatan kerja atau peningkatan pendapatan yang diperoleh. Pemberdayaan psikologis mengacu pada potensi pariwisata untuk meningkatkan rasa kepemilikan, kebanggaan dan harga diri penduduk lokal terhadap adanya pariwisata, hal ini dapat berupa adanya kerja sama yang intens dengan pihak luar atau kesempatan untuk mengikuti pelatihan untuk meningkatkan keterampilan. Pemberdayaan sosial mengacu pada kemampuan pariwisata untuk meningkatkan interaksi atau kolaborasi masyarakat, hal ini dapat berupa peningkatan aktivitas sosial atau organisasi masyarakat dalam kehidupan sosial. Pemberdayaan politik

menyiratkan bahwa suara dan perhatian masyarakat harus menjadi panduan pengembangan dalam proses pembangunan pariwisata dari perencanaan hingga implementasi, hal ini dapat berupa adanya kesempatan untuk menyampaikan pendapat dalam forum, musyawarah atau diskusi yang diselenggarakan (2021, pp. 24–34).

3. *Elit Capture*

Elite capture merupakan konsep yang pada awalnya banyak digunakan dalam pendekatan ekonomi politik (Zaman et al., 2024). *Elite capture* adalah sebuah situasi dimana para elit politik membentuk proses pembangunan sesuai dengan prioritas mereka atau sumber daya pembangunan yang sesuai untuk keuntungan pribadi, sehingga terdapat proses yang dilakukan oleh para elit yang berkuasa untuk mengambil sumber daya yang diperuntukkan bagi masyarakat bawah dan menentukan kebijakan dengan cara melindungi kepentingan mereka sendiri (Al-Ra'zie & Wahyudi, 2022; Ayubi & Raffiudin, 2023; Zaman et al., 2024; Zulfiqar & Moosvi, 2022). Dalam pengertian yang sama, elite capture diyakini terjadi ketika sekelompok elit dalam banyak kasus merupakan orang “kuat” secara politik atau ekonomi melakukan manipulasi pengambilan keputusan dari berbagai agenda untuk kepentingan mereka (Zaman et al., 2024), memiliki keunggulan atau superioritas apabila dibandingkan dengan kelompok atau golongan lainnya (Sakti, 2021).

Elite atau kelompok elit didefinisikan dalam beberapa golongan, yaitu Menurut Thomas (2005) menyatakan bahwa kelompok elit adalah kelompok dominan dalam hal sumber daya ekonomi berdasarkan latar belakang etnis, dan gender. Sedangkan Post (2008) mendefinisikan bahwa *elite* adalah aktor

yang memiliki pengaruh yang proporsional terhadap proses dan hasil pembangunan sebagai akibat dari status sosial, politik, atau ekonomi mereka yang lebih tinggi. DiCaprio (2012) mendefinisikan *elite* sebagai kelompok sosial yang berbeda yang menikmati status istimewa dan memiliki kontrol dalam menentukan arah dan tujuan organisasi masyarakat melalui jabatan atau kekayaan (Zulfiqar & Moosvi, 2022).

Golongan elit juga dapat dianalisis dari individu atau kelompok yang dapat mendominasi program-program dimana kepentingan umum harus dibuat, dilaksanakan, dan dikelola oleh masyarakat. Elit juga dapat ditemukan pada individu atau kelompok yang memiliki akses serta kontrol atas berbagai struktur (ekonomi, sosial, dan organisasi) karena para elit berasal dari kelas yang memiliki properti dan tanah dengan tingkat pendapatan yang tinggi, mereka biasanya berasal dari kelompok kasta yang dominan secara lokal atau keluarga lokal yang ditempatkan lebih tinggi dalam hierarki sosial serta mungkin memiliki basis politik dan menduduki posisi penting dalam partai. Elit juga dapat ditemukan pada individu yang memiliki kepemilikan tanah yang luas atau posisi tradisional seperti kepala desa atau kepemimpinan kasta sebagai orang yang memiliki koneksi politik serta mampu menggabungkan kekuasaan, kekayaan, prestise sehingga memiliki pengaruh dominan dalam politik desa (Zulfiqar & Moosvi, 2022). Definisi-definisi elit sebelumnya bersifat sesuai dengan kontekstual yang tertanam dalam literatur mengenai lembaga, politik formal, analisis kelas dan kasta.

Tulisan tentang *knowledge brief* yang berjudul “*Understanding Elite Capture*” oleh Fahd Zulfiqar dan Abbas Moosvi mengajukan dua opsi dari

adanya fenomena elite capture, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif menyebutkan bahwa terdapat tingkat kepuasan yang tinggi terhadap proyek-proyek yang pengambilan keputusannya didominasi oleh para elite yang didasarkan pada beberapa alasan: 1) keterlibatan elit tidak menghambat pencapaian tujuan proyek sebab elit melakukan fungsinya secara transparan dan lebih condong ke arah partisipasi masyarakat, terutama perempuan dan anak-anak. 2) para elit dapat meningkatkan nilai proyek dengan menyumbangkan keahlian dan memobilisasi sumber daya dengan baik. 3) terdapat dampak positif yang mencakup peningkatan rasa memiliki masyarakat terhadap proyek-proyek (Zulfiqar & Moosvi, 2022).

Dampak negatif menyebutkan bahwa: 1) elit memiliki kendali atas keputusan masyarakat dan memiliki otonomi untuk membuat aturan yang menghambat keterlibatan masyarakat dalam proyek pembangunan. 2) tingkat ketidaksetaraan yang lebih tinggi di daerah pedesaan, karena elit memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap keputusan masyarakat dan kemampuan yang lebih besar untuk mengkooptasi anggota masyarakat yang berpengaruh. Hal ini secara empiris berlaku untuk masyarakat yang heterogen dan memiliki populasi yang besar sehingga faktor tersebut menjadi penghalang bagi aksi kolektif dan karenanya masyarakat seperti itu lebih rentan. 3) munculnya elit tradisional, yang disebabkan oleh adanya keterlibatan pihak luar atau LSM yang berbasis di perkotaan atau organisasi lain melalui kekuatan destruktif dan kooptasi dengan elit tradisional, sehingga dapat memperoleh posisi kepemimpinan di tingkat desa dan menguasai sumber daya pembangunan. Proyek-proyek ini sengaja dimulai sebelum langkah-langkah pembangunan kapasitas yang memadai dilaksanakan. 4) elit proyek

pembangunan dilibatkan untuk melanjutkan implementasi sebelum aturan dan proses yang jelas ditetapkan untuk memandu kegiatan (Zulfiqar & Moosvi, 2022).

1.7 Operasionalisasi Konsep

Berikut definisi konsep yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Politik pembangunan adalah strategi atau cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan
2. Pemberdayaan adalah manfaat yang didapatkan oleh aktor dalam pembangunan atas keterlibatannya pada proses pembangunan yang meliputi pemberdayaan ekonomi, sosial, politik dan psikologi
3. Politik pembangunan berbasis pemerdayaan adalah strategi atau cara yang digunakan dalam mencapai manfaat pembangunan bagi para aktor yang terlibat dalam Pembangunan, dilihat dari dimensi berikut:
 - a. Aktor adalah individu atau kelompok yang terlibat pada proses pembangunan dan mempengaruhi tujuan pembangunan. Aktor dalam pembangunan dilihat dari tiga kategori yaitu institusi politik, kelompok sosial dan kelompok ekonomi. Aktor berasal dari desa maupun luar desa
 - b. Kekuasaan adalah kemampuan atau modal dimiliki oleh aktor untuk dilibatkan pada pembangunan, baik berupa modal sosial maupun ekonomi
 - c. Sistem adalah struktur yang mengatur interaksi antar aktor pada proses pembangunan, struktur yang dimaksud adalah siapa yang menjadi penanggung jawab, pelaksana dan pengawas atau pendukung dalam proses pembangunan.
 - d. Ideologi adalah cara pandang aktor terhadap arah dan tujuan pembangunan, cara pandang yang dimaksud adalah apakah pembangunan

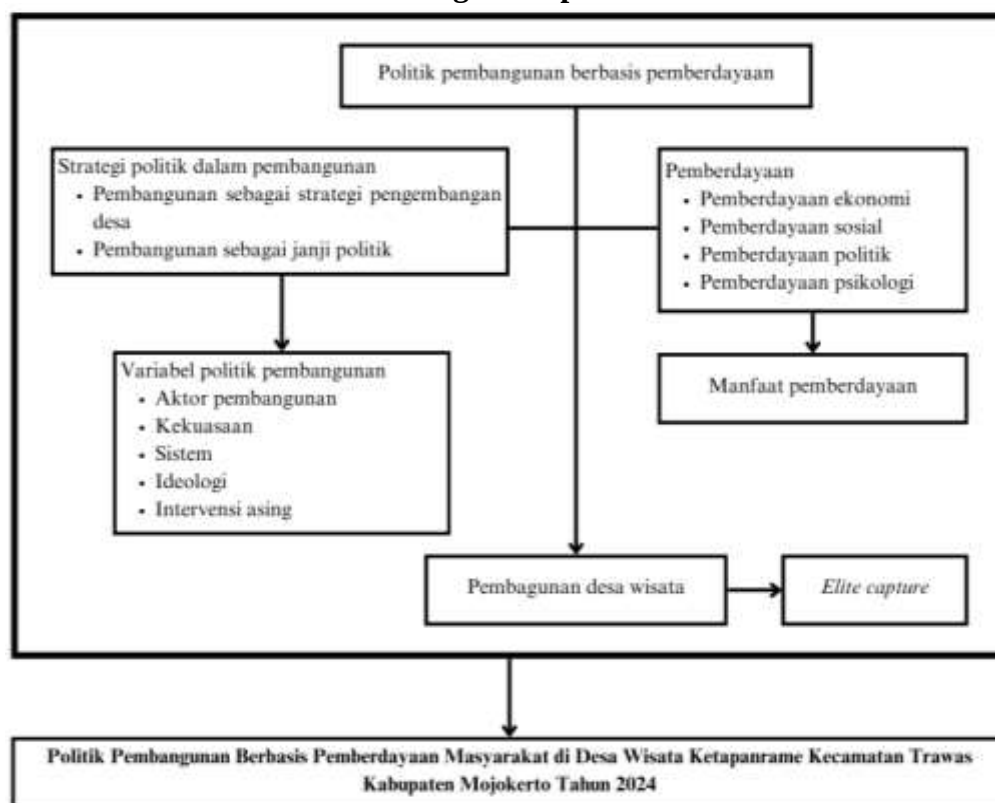
merupakan pembangunan berkelanjutan, pembangunan partisipatif, pembangunan ekonomi atau pembangunan sosial.

- e. Intervensi asing atau pihak luar adalah keterlibatan pihak luar desa pada pembangunan desa wisata, pihak luar desa yang dimaksud adalah pemerintah daerah, individu atau swasta yang berasal dari luar desa
4. Desa wisata adalah bentuk pembangunan yang mengintegrasikan kehidupan masyarakat desa dengan kegiatan wisata .
5. *Elite Capture* adalah individu atau kelompok yang mendominasi tujuan dari pembangunan, yakni siapa elit pada Pembangunan serta dampak yang disebabkan dari munculnya elit pada pembangunan

1.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran dari pola pikir atau gagasan yang digunakan, sebagai berikut:

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir Penelitian



1.9 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna, penelitian kualitatif melibatkan upaya pencarian makna melalui kegiatan wawancara dan prosedur lainnya untuk mengumpulkan data (Creswell, 2014, p. 3).

1.9.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe studi kasus untuk memahami latar belakang persoalan atau interaksi individu atau kelompok secara mendalam, utuh, holistik, intensif, dan naturalistik (Yusuf, 2017, p. 339). Studi kasus adalah strategi penelitian yang dilakukan peneliti untuk menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok individu. Kasus ini dibatasi oleh waktu dan aktivitas sehingga peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap melalui prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditetapkan (Creswell, 2014, p. 14). Sementara Miles dan Huberman menjelaskan bahwa studi kasus adalah investigasi terhadap suatu fenomena yang terjadi dalam konteks tertentu (Yusuf, 2017, p. 339). Sehingga penelitian ini menggunakan tipe studi kasus untuk memahami proses pembangunan di Desa Wisata Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto.

1.9.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan suatu batasan penelitian yang digunakan untuk pembatas permasalahan dengan tujuan agar penelitian memiliki fokus pada pokok permasalahan. Batasan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini dilakukan di Desa Wisata Ketapanrame Kabupaten Mojokerto dan berfokus pada pembahasan politik pembangunan berbasis pemberdayaan.
- b. Maksud dari politik pembangunan berbasis pemberdayaan dalam penelitian ini adalah melakukan analisis terhadap strategi atau cara yang digunakan dalam proses pembangunan desa wisata dengan melibatkan aktor diluar institusi pemerintah desa yaitu masyarakat desa serta bentuk pemberdayaan para aktor atas keterlibatannya dalam pembangunan.
- c. *Elit Capture* dalam penelitian ini digunakan sebagai alat analisis untuk mengkaji kemunculan kelompok elit pada proses pembangunan desa wisata dan selanjutnya dapat dilakukan analisis terhadap dampak dari kemunculan elit terhadap penguasaan hasil pembangunan.

1.9.3 Fenomena Penelitian

Fenomena yang dikaji dalam penelitian ini tentang strategi politik yang dilakukan oleh aktor pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Ketapanrame Kabupaten Mojokerto serta melakukan analisis terhadap kemunculan kelompok elit dan dampak dari kemunculan elite terhadap hasil pembangunan desa wisata.

1.9.4 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini memiliki 2 (dua) jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah sumber informasi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab terhadap pengumpulan data dan penyimpanan data atau disebut dengan sumber data sebagai informasi utama. Data primer diperoleh

dari proses wawancara kepada narasumber yang ditemui di lokasi penelitian yaitu Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto.

- b. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari buku, catatan, dokumen atau arsip yang ada untuk melengkapi dan menunjang keabsahan data primer. Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan melalui kegiatan observasi atau pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap aktivitas sosial maupun politik di lokasi penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini juga didapatkan melalui dokumentasi yang berupa dokumen atau arsip yang didapatkan di lokasi penelitian dan melalui literatur yang relevan dengan judul penelitian.

1.9.5 Informan Penelitian

Pemilihan informan pada penelitian ini menggunakan model *purposive sampling* dengan tujuan dan pertimbangan dari peneliti dalam melakukan penelitian sehingga dapat memenuhi maksud dan tujuan yang telah ditetapkan (Yusuf, 2017, p. 369). Informan atau narasumber dalam penelitian ini yaitu:

1. Zainul Arifin selaku Kepala Desa Ketapanrame
2. Muhammad Taufiq selaku Badan Permusyawaratan Desa Ketapanrame
3. Herwanto selaku Ketua Badan Usaha Milik Desa Ketapanrame
4. Nur Fadilah selaku Ketua Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Ketapanrame
5. Karno Adi Sucipto selaku Ketua Kelompok Sadar Wisata Rakasiwi
6. Khusnul Yaqin selaku Ketua Kelompok Usaha Bersama Taman Ghanjaran
7. Slamet Nur Fauzi selaku Karang Taruna Desa Ketapanrame

1.9.6 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini adalah peneliti sebagai instrumen penelitian itu sendiri, sehingga keberhasilan dalam pengumpulan data ditentukan oleh kemampuan peneliti dalam menghayati situasi sosial yang dijadikan fokus penelitian (Yusuf, 2017, p. 372).

1.9.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dengan informan sebagai orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung (Creswell, 2014, p. 228). Dalam penelitian ini menggunakan wawancara terencana tidak terstruktur, yaitu susunan rencana wawancara tetapi tidak menggunakan format dan urutan yang baku (Yusuf, 2017, p. 377). Peneliti melakukan wawancara kepada narasumber di lokasi yang telah disepakati bersama informan, dengan keterangan sebagai berikut:

- a. Wawancara kepada Kepala Desa Ketapanrame dilakukan di Kantor Kepala Desa yang berlokasi di Balai Desa Ketapanrame pada tanggal 09 Oktober 2024.
- b. Wawancara kepada Ketua BUMDes Mutiara Welirang dilakukan di *Foodcourt* Taman Ghanjaran pada tanggal 09 Oktober 2024.
- c. Wawancara kepada Ketua BPD Ketapanrame dilakukan di Kantor BUMDes Mutiara Welirang pada tanggal 12 Oktober 2024.
- d. Wawancara kepada Ketua KUB Taman Ghanjaran dilakukan di Kantor KUB Taman Ghanjaran pada tanggal 13 Oktober 2024.

- e. Wawancara kepada Ketua PKK dilakukan di kediaman narasumber yang berlokasi di Desa Kesiman Kecamatan Trawas pada tanggal 12 Oktober 2024.
- f. Wawancara kepada Ketua Pokdarwis Rakasiwi dilakukan di Kantor Pokdarwis pada tanggal 12 Oktober 2024.
- g. Wawancara kepada Karang Taruna dilakukan di Balai Desa Ketapanrame pada tanggal 10 Oktober 2024.

Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui catatan atau karya tentang sesuatu yang sudah ada, dapat berbentuk dokumen, teks tertulis, gambar atau foto yang merupakan sumber informasi dalam penelitian kualitatif (Creswell, 2014, pp. 228–229). Pada proses dokumentasi, peneliti menggunakan bantu berupa ponsel seluler untuk melakukan rekaman audio pada proses wawancara dan observasi dengan tujuan untuk membantu peneliti dalam menyusun transkrip wawancara serta melakukan pengambilan gambar atau foto terhadap kegiatan yang diamati di lokasi penelitian meliputi kegiatan pengelolaan pariwisata di Desa Ketapanrame.

Observasi adalah kegiatan pengamatan secara langsung oleh peneliti dengan cara turun ke lapangan atau lokasi penelitian untuk mengamati dan mengumpulkan data nonverbal (2014, p. 228). Dalam penelitian ini menggunakan jenis *participant as observer* yang berarti, peneliti hanya berfungsi dalam kelompok masyarakat sebagai pengamat, yang berarti peneliti hadir sebagai subordinat dari kelompok sesuai dengan fungsi formalnya dan diterima oleh kelompok selama waktu mengamati kegiatan kelompok (Yusuf, 2017, p. 389). Pengamatan yang dilakukan di lokasi penelitian meliputi kegiatan pengelolaan pariwisata yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Ketapanrame

bersama BUMDes yang bekerja sama dengan mitra usaha kerja mereka di Desa Ketapanrame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto.

1.9.8 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian adalah proses sistem pencarian dan pengaturan transkrip wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumen, foto dan material lainnya untuk meningkatkan pemahaman terhadap data yang telah dikumpulkan sehingga dapat disajikan (2017, p. 401). Miles dan Huberman (Yusuf, 2017, p. 407) menegaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, data yang terkumpul melalui berbagai teknik pengumpulan data yang berbeda-beda seperti wawancara, dokumentasi dan observasi yang berupa kata atau penjelasan selanjutnya dapat diproses dan dianalisis melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu:

- a. Reduksi data sebagai proses pemilihan, penyederhanaan, pemisahan dan transformasi data yang diperoleh. Dalam hal ini peneliti melakukan penyederhanaan data yang diperoleh dari proses wawancara kepada narasumber penelitian yang terdiri atas Kepala Desa Ketapanrame, Ketua BPD Ketapanrame, Ketua BUMDes Ketapanrame, Ketua PKK Desa Ketapanrame, Ketua Pokdarwis, Ketua KUB Taman Ghanjaran dan Karang Taruna.
- b. Display data dalam penelitian ini merupakan kumpulan informasi yang telah disusun sehingga dapat ditarik kesimpulan. Bentuk display data dalam penelitian ini berupa teks naratif dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada narasumber penelitian serta deskripsi peristiwa yang peneliti amati dilokasi penelitian. Penyajian data lain juga berupa dokumentasi dalam penelitian yang berupa foto lokasi penelitian, kegiatan yang sedang diamati dan dokumen atau arsip yang didapatkan oleh peneliti di lokasi penelitian.

- c. Penarikan kesimpulan, tahapan terakhir pada proses analisis data yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hal ini dilakukan sejak awal pengumpulan data yang dilakukan melalui catatan atau rekaman wawancara kepada narasumber penelitian sehingga maksud dari informasi yang didapatkan oleh peneliti dari proses wawancara, observasi dan dokumentasi bisa dideskripsikan serta mudah dipahami.
- d. Triangulasi data, pada proses analisis data juga dilakukan triangulasi data untuk mendapatkan intepretasi data yang lebih akurat dan kredibel (Creswell, 2014, p. 240). Dalam penelitian ini triangulasi dilakukan melalui komparasi antara data-data yang berasal dari proses wawancara kepada narasumber, observasi kegiatan di lokasi penelitian dengan dokumen atau arsip lain yang relevan dengan topik pembahasan pada laporan penelitian.